



**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (RENJA)**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022**



Alamat : Kompleks Perkantoran BUMI PRAJA Laworo

BAB I

PENDAHUAN

Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan awal untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Sekretariat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rancangan Awal Renja Sekretariat merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah ini sangatlah menentukan untuk terlaksananya kualitas pelayanan publik yang baik.

Proses penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat daerah ini dimulai dengan persiapan penyusunan Rancangan Awal Renja dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan Sekretariat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Sekretariat Daerah tahun lalu sesuai Renstra Sekretariat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

Rumusan program/kegiatan di dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Sekretariat Daerah Tahun 2022,

- b. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian merujuk kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- c. Penyusunan R a n c a n g a n A w a l Renja Sekretariat Daerah adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Sekretariat Daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana untuk tahun 2022.

Keterkaitan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Sekretariat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Sekretariat daerah dan RKPD. Renja Awal Sekretariat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat selama tahun 2021 - 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

**TABEL : REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2021**

No	Sasaran Strateis	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tercapainya Penyelenggaraan dan penggunaan Arsip Dinamis, Penciptaan dan penggunaan Arsip dinamis	Program Pengelolaan Arsip			
			20.992.930	1.629.288	77,61%
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota *	20.992.930	16.292.880	100%
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	14.996.920	10.296.900	68,66%
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	5.996.010	5.995.980	100%
	Tercapainya Persentase Arsip yang dinilai dan ditetapkan dengan nilai retensi dibawah 10 Tahun				
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			
			15.748.680	9.248.680	58,73%
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah daerah Kab./Kota yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun	15.748.680	9.248.680	58,73%

2		Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di Bawah 10 Tahun	15.748.680	9.248.680	58,73%
3	Tercapainya Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan yang tersedia dan tercapainya jumlah koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-OPD dan Perubahan RKA_ OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	15.365.555.443		
		Perencanaan Penganggaran, dan Evauasi Kinerja Perangkat daerah *	109.589.367	109.589.367	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *	24.590.000	24.589.662	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD *	9.999.757	9.999.647	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA_SKPD *	9.999.970	9.999.870	100%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	9.999.981	9.999.981	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD *	9.999.900	9.999.900	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ihtisar realisasi Kinerja SKPD*	29.999.885	29.999.815	100%
		Evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	14.999.874	14.999.827	100%
		Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.379.402.689		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	3.965.549.648	3.352.555.437	84.54%
		Penyediaan Adm.Pelaksanaan Tugas ASN*	30.000.000	29.997.000	99,99%

			100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD*	1.301.000.000		
			16,75%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD*	19.996.775	19.980.700	
Pengelolaan dan Penyiapan bahan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan *	19.999.800	19.984.500	99,92%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /Triwulan /semesteran*	29.999.400	29.766.900	99,22%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	15.000.000	14.985.000	99,9
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *	356.533.500	266.313.500	74,7
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	58.050.000	58.050.000	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *	199.963.500	199.963.500	100%
Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Berdasarkan tugas dan fungsi *	98.520.000	8.300.000	8.4%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan *	-	-	0%
Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang- undangan*	-	-	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.727.327.690	-	-

	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *	30.000.000	30.000.000	100%-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor*	89.785.000	89.765.000	99,98%
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga*	49.907.700	49.883.000	99.95%
	Penyediaan Bahan logistic Kantor	400.000.000	400.000.000	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	34.999.990	34.999.910	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- undangan*	50.000.000	50.000.000	100%
	Penyediaan bahan Material*	80.000.000	80.000.000	100%
	Pelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD*	999.920.000	997.549.257	99,76%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*	1.745.681.350	1.707.416.000	97,81%
	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan *	1.485.000.000	1.446.900.000	97,43%
	Pengadaan Meubel*	11.144.600	11.088.000	99,49%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	50.000.000	50.000.000	100%

	Pengadaan sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya*	199.536.750	199.428.000	99,95%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	375.789.789	346.849.667	92.30%
	Penyediaan Jasa Surat- menyurat*	9.999.860	9.999.665	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan listrik*	145.789.999	116.850.132	80.25%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor*	200.000.000	200.000.000	100%
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor*	19.999.930	19.999.870	100%
	Pemeliharaan barang Mlik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.319.988.370	131.988.354	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pereorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan*			100%
		299.990.250	299.988.350	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan*	599.998.120	599.998.120	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *	20.000.000	20.000.000	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi, Gedung Kantor atau Bangunan lainnya*	150.000.000	150.000.000	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor gedung kantor atau Bangunan lainnya*	150.000.000	150.000.000	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya*	100.000.000	100.000.000	100%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan wakil kepala daerah	3.814.893.718		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *	315.000.000		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah*	99.894.000	99.894.000	100%
	Pelaksanaan Medical Check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah*	150.000.000	150.000.000	100%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah *	3.031.259.718	3.029.813.180	99.95%

		Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat daerah	600.000.000	599.941.000	99,99%
		Penyediaan Kebutuhan Rumahtangga Kepala Daerah*	600.000.000	599.941.000	99,99%
		Penataan Organisasi	347.008.000	346.016.000	99,71%
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	34.920.000	34.586.500	99,04
		Fasilitas Pelayanan publik dan tatalaksana*	220.250.000	219,816,500	99,80%
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	91.838.000	91,613,000	99,76%
		Pelaksanaan Protokol dan komunikasi pimpinan	664.328.000	663.536.400	99,88%
		Fasilitas Keprotokolan*	398.821.000	398.359.700	99,88%
		Fasilitas komunikasi pimpinan	231.577.000	231.256.700	99,86%
		Pendokumentasian Tugas pimpinan	33.930.000	33.920.000	99,97%
4	Tercapainya Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	3.792.855.720		
		Administrasi Tata Pemerintahan*	390.195.400	388.478.700	99,56%
		Penataan Administrasi Pemerintahan*	63.944.070	63.576.950	99,43
		Pengelloaan Administrasi Kewilayan*	99.038.250	97.688.750	98,64
		Fasilitas Pelaksanaan Otonomi daerah*	227.213.080	227.213.000	100%
		Pelaksanaan Kebijakan Kebijaksanaan Rakyat*	1.919.996.730		

	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual *	1.400.000.000	1.300.000.000	92,86%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja erkait Kesejahteraan Sosial*	451.212.410	451.123.165	99,98%
	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi, dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	119.999.320	118.417.000	98,68%
	Faslitasi dan koordinasi Hukum	727.129.620	603.399.339	82,98%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah*	268.760.010	258.974.846	96,36%
	Fasilitasi Bantuan Hukum*	338.369.730	335.189.113	99,06%
	Pendokumentasian Produk hokum dan Pengelolaan informasi hukum	119.999.880	9,235,380	7,70%
	Faslitasi Kerjasama Daerah	848.229.700	490.873.150	57,87%
	Fasilitasi Kerjasama dakam negri	376.060.000	266.061.300	70,75%
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	472.169.700	224.811.850	47,61%
	Pelaksanaan Kebijakan Perkonomian	142.999.370	120.825.150	84,89%
	Koordinasi,Singkronisasi,Monitoring,dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	42.999.770	36.039.200	83,81%
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	49.999.800	45.231.200	90,46%
	Perncanaan dan Pengawasan Perekonomian Mikro kecil	49.999.800	39.554.750	79,11%

	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	281.054.970	267.249.100	95,09%
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	38.733.700	29.416.000	75,94%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	190.238.670	190.150.600	99,95%
	Pengelolaan Evaluasi dan Laporan Pembangunan	52.082.600	47.682.500	91,55%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	995.782.986	988.920.300	99,31%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	76.493.586	76.287.500	99,73%
	Pengelolaan Layanan Secara Elektronik	795.336.680	788.736.600	99,17%
	Pembinaan dan Advokasi Pengelolaan Barang dan Jasa	123.952.720	123.896.200	99,95%
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	166.720.595	133.032.300	79,79%
	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	67.473.095	67.472.595	100%
	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	49.249.795	15.729.000	31,94%
	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Energi dan air	49.997.705	49.830.705	99,67%

C. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Tabel C.1.

Keterkaitan Isu dan Kebijakan Kabupaten, Provinsi, Nasional

No.	Kebijakan		
	Kabupaten	Provinsi	Nasional
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Kreatif, Sehat, Produktif, Inovatif, Berkarakter dan Berbudi Pekerti Luhur	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Akan meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera.
2.	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis adropolitan dan minapolitan. Mengembangkan potensi wisata, lingkungan hidup yang lestari, dan keragaman budaya daerah sesuai dengan kearifan lokal	Pembangunan Ekonomi	Akan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.	Revitalisasi pemerintah daerah.	Akan melakukan revolusi karakter bangsa. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

<p>Khususnya terkait dengan tujuan meningkatkan semangat persatuan, kesatuan dan yoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p>		
<p>Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Wilayah Yang Memadai dan Berkualitas.</p>	<p>Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis</p>	<p>Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.</p>

Sumber: RPJMD Kab.Muna Barat 2017-2022, RPJMD Prov.Sultra 2013-2018 dan RPJMN 2014-2019

Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat yang merupakan *satu kesatuan* dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

- 1) Visi adalah sebagai penggambaran kondisi ideal yang akan dicapai dimasa depan dimana keberhasilan pelayanan publik, administrasi dan pemerintahan yang baik merupakan prioritas utama dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Muna Barat. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat menetapkan Visi Tahun 2017-2021 yang dirumuskan menjadi sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK, ADMINISTRASI DAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK “ yang berarti dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Muna Barat untuk mensejahterakan masyarakat perlu didukung upaya memberikan pelayanan publik, administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat kedepan, maka dirumuskan Misi tunggal Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2020 sebagai berikut : “ MELAKSANAKAN SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN DAN KEPEMERINTAHAN YANG EFEKTIF

DAN EFISIEN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. “Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat dalam pembangunan, pengembangan dan penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan administrasi kepemimpinan yang baik dan profesional dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:
 - 1) Terlaksananya kebijakan keuangan secara selektif dan profesional dengan melaksanakan tertib administrasi keuangan secara konsisten; Terciptanya database kepegawaian yang mampu memberikan akses informasi akurat;
 - 2) Terlaksananya mekanisme inventarisasi barang dan aset daerah;
 - 3) Terciptanya sistem pengarsipan dan dokumentasi;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan organisasi dengan sasaran- sasaran sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya sumber daya manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat;
 - 2) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif.
- c. Terwujudnya peraturan perundang-undangan sebagai pendukung

14

pelaksanaan otonomi daerah dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya struktur organisasi dan kelembagaan perangkat daerah yang ramping dan kaya fungsi;
 - 2) Terlaksananya mekanisme dan tata kerja kelembagaan perangkat daerah;
 - 3) Terwujudnya Peraturan daerah dan produk-produk hukum sesuai dengan kebutuhan;
 - 4) Meningkatnya hubungan antar lembaga pemerintah.
- d. Meningkatkan pembinaan sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha dengan sasaran-sasaran sebagai berikut :
 - 1) Terlaksananya peningkatan sosial ekonomi masyarakat ;
 - 2) Terlaksananya pembinaan hubungan kerja antar dunia usaha.

Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh SEKRETARIAT DAERAH adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 yaitu ***“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif dan Berdaya saing Dengan dilandasi***

Oleh Nilai Nilai Religius “. Secara lebih spesifik dapat disebutkan bahwa program dan kegiatan terpilih harus terkait langsung dengan upaya:

- a. Membuka keterisolasian daerah, dalam rangka peningkatan aksesibilitas antar sektor terkait dalam wilayah Kabupaten Muna Barat;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance)

D. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 merupakan pedoman program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Muna Barat periode 2017-2022. Dokumen Rancangan Awal Renja selanjutnya akan disusun dalam bentuk Renja dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang lebih detail dalam Program Prioritas dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 dapat di tampilkan pada tabel berikut:

Tabel : Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Capaian Kinerja			Capaian Kinerja				
1					2	3	4	5	6	7	8	9			
													13.200.000		
4	01	01	2,02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	% Tersusunnya Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan	Setda	100%	12.000.000	APBD II	100%		13.200.000		
4	01	01	2,02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	% Hasil pemeriksaan yang ditanggapi	Setda	93%	24.000.000	APBD II	95%		26.400.000		
16															
4	01	01	2,02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	% Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD yang tepat waktu	Setda	48%	30.000.000	APBD II	50%		33.000.000		
4	01	01	2,02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/ Semesteran yang Tersusun	Setda	1 Dokumen	40.000.000	APBD II	1 Dokumen		44.000.000		
4	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran yang Tersusun	Setda	1 Dokumen	12.000.000	APBD II	2 Dokumen		13.200.000		
4	01	01	2,02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Setda	1 Dokumen	20.000.000	APBD II	1 Dokumen		22.000.000		
4	01	01	2,03		Administrasi Umum	% Pemenuhan Adnimistrasi Umum	Setda	98%	9.847.000.000	APBD II	100%		10.831.700.000		
4	01	01	2,03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan Surat Menyurat yang dipenuhi	Setda	90%	12.000.000	APBD II	97%		13.200.000		
4	01	01	2,03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% Tersedianya Jaringan Internet, Volume Air , Jumlah KWh Listrik	Setda	100%	160.000.000	APBD II	100%		176.000.000		

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Capaian Kinerja			Capaian Kinerja				
1					2	3	4	5	6	7	8	9			
4	01	01	2,03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda	100%	650.000.000	APBD II	100%	715.000.000			
4	01	01	2,03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	% Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Setda	95%	150.000.000	APBD II	100%	165.000.000			
4	01	01	2,03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	% kendaraan Dinas yang dipelihara/ Diperpanjang perizinanannya	Setda	90%	60.000.000	APBD II	90%	66.000.000			
4	01	01	2,03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% Pemenuhan Jasa Administrasi Keuangan	Setda	100%	1.675.000.000	APBD II	100%	1.842.500.000			
4	01	01	2,03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	% Pemenuhan Alat Kebersihan dan bahan pembersih Kantor	Setda	100%	20.000.000	APBD II	100%	22.000.000			
4	01	01	2,03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	% Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang dipenuhi	Setda	100%	20.000.000	APBD II	100%	22.000.000			
4	01	01	2,03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	% Ketersediaan Alat Tulis Kantor yang dipenuhi	Setda	100%	80.000.000	APBD II	100%	88.000.000			
4	01	01	2,03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	% Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang dipenuhi	Setda	100%	35.000.000	APBD II	100%	38.500.000			
4	01	01	2,03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan	Setda	100%	30.000.000	APBD II	100%	33.000.000			
4	01	01	2,03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipenuhi	Setda	100%	30.000.000	APBD II	100%	33.000.000			

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Capaian Kinerja			Capaian Kinerja			
1					2	3	4	5	6	7	8	9		
17														
4	01	01	2,03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang dipenuhi	Setda	100%	50.000.000	APBD II	100%	55.000.000		
4	01	01	2,03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	% Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Setda	100%	50.000.000	APBD II	100%	55.000.000		
4	01	01	2,03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	% Ketersediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman yang dipenuhi	Setda	100%	800.000.000	APBD II	100%	880.000.000		
4	01	01	2,03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Setda	100%	2.000.000.000	APBD II	100%	2.200.000.000		
4	01	01	2,03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	% Realisasi Kendaraan Dinas/Operasional	Setda	100%	1.000.000.000	APBD II	100%	1.100.000.000		
4	01	01	2,03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	% Realisasi Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Setda	100%	200.000.000	APBD II	100%	220.000.000		
4	01	01	2,03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	% Realisasi Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipenuhi	Setda	100%	30.000.000	APBD II	100%	33.000.000		
4	01	01	2,03	23	Pengadaan Peralatan Rumah	% Realisasi Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Setda	100%	50.000.000	APBD II	100%			

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Capaian Kinerja			Capaian Kinerja			
1					2	3	4	5	6	7	8	9		
18														
4	01	01	2,03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	% Rumah Jabatan Yang Dipelihara	Setda	99%	300.000.000	APBD II	100%	330.000.000		
4	01	01	2,03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	% Luas Rumah/Gedung kantor yang direhab	Setda	100%	400.000.000	APBD II	100%	440.000.000		
4	01	01	2,03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	% Mobil Jabatan Yang Direhab	Setda	0%	50.000.000	APBD II	0%	55.000.000		
4	01	01	2,03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	% Kendaraan Dinas Roda-4 & Roda-2 yang direhab	Setda	0%	200.000.000	APBD II	0%	220.000.000		
4	01	01	2,04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% Peningkatan dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Setda	85%	700.000.000	APBD II	95%	770.000.000		
4	01	01	2,04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Setda	100%	430.000.000	APBD II	100%	473.000.000		
4	01	01	2,04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan	Setda	200 Lembar	15.000.000	APBD II	200 Lembar	16.500.000		
4	01	01	2,04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri yang disediakan	Setda	200 Lembar	15.000.000	APBD II	200 Lembar	16.500.000		
4	01	01	2,04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Setda	200 Lembar	30.000.000	APBD II	200 Lembar	33.000.000		
4	01	01	2,04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	% PNS yang Mengikuti Bimtek	Setda	100%	150.000.000	APBD II	100%			

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Kebutuhan		Sumber Dana	Target	Kebutuhan				
								Capaian Kinerja	Dana/Pagu	Indikatif		Capaian Kinerja	Dana/Pagu	Indikatif			
1					2	3	4	5	6	7	8	9					
														165.000.000			
4	01	01	2,04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi	Setda	100%	30.000.000	APBD II	100%			33.000.000			
4	01	01	2,04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	% PNS yang Mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-Undangan	Setda	100%	30.000.000	APBD II	100%			33.000.000			
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	% Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan dan kesra		95%	6.070.000.000	APBD II	100%			6.677.000.000			
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan	% Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	Setda	85%	270.000.000	APBD II	95%			297.000.000			
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	% Penataan Administrasi Pemerintahan	Setda	95%	70.000.000	APBD II	100%			77.000.000			
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	% Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Setda	75%	110.000.000	APBD II	80%			121.000.000			
19																	
4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	% Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Setda	75%	90.000.000	APBD II	80%			99.000.000			

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Capaian Kinerja			Capaian Kinerja				
1					2	3	4	5	6	7	8	9			
4	01	02	2,02		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	% Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11 Kec.	98%	1.035.000.000	APBD II	100%	1.138.500.000			
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	% Pelaksanaan Pembinaan Mental Spritual yang terfasilitasi	Setda/ Muna Barat	100%	320.000.000	APBD II	100%	352.000.000			
4	01	02	2,02	02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	% Evaluasi Pelaksanaan dan Kebijakan capaian kinerja terhadap kesejahteraan Sosial	Setda/ Muna Barat	100%	615.000.000	APBD II	100%	676.500.000			
4	01	02	2,02	03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	% Evaluasi Pelaksanaan dan Kebijakan capaian kinerja terhadap kesejahteraan Rakyat	Setda/ Muna Barat	100%	100.000.000	APBD II	100%	110.000.000			
	01	02	2,03		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	% Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Setda	90%	575.000.000	APBD II	100%	632.500.000			
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	% Penyusunan Produk Hukum Daerah yang terfasilitasi	Setda	40%	300.000.000	APBD II	50%	330.000.000			
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	% Bantuan Hukum yang terfasilitasi	Setda/ Muna Barat	47%	165.000.000	APBD II	50%	181.500.000			
	01	02		03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	% Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Terdokumentasi	Setda	75%	110.000.000	APBD II	80%	121.000.000			

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
													1	2	3	4	5
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	% Kerjasama Daerah Yang Difasilitasi Didalam dan Luar Negeri	Setda	95%	4.190.000.000	APBD II	100%	4.609.000.000					
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	% Kerjasama Daerah Yang Difasilitasi Dalam Negeri	Setda/Dalam Negeri	100%	1.990.000.000	APBD II	100%	2.189.000.000					
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	% Capaian Pelaksanaan Kerja Sama	Setda/Mun a Barat	100%	2.200.000.000	APBD II	100%	2.420.000.000					
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	% Peningkatan Perekonomian Daerah dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Setda	90%	1.565.000.000	APBD II	95%	1.721.500.000					
4	01	03	2,01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	% Hasil Evaluasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kebijakan Perekonomian	Setda	90%	160.000.000	APBD II	95%	176.000.000					
	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	% Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi serta Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Setda/Mun a Barat	70%	40.000.000	APBD II	85%	44.000.000					
20																	
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	% capaian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Setda	75%	60.000.000	APBD II	80%	66.000.000					
	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	% Pengawasan pelaku Ekonomi Mikro kecil	Setda	100%	60.000.000	APBD II	100%	66.000.000					
4	01	03	2,02		Administrasi Pembangunan	% tertibnya Administrasi Kegiatan dan Ketepatan	Setda	80%	300.000.000	APBD II	95%						

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Capaian Kinerja			Capaian Kinerja				
1					2	3	4	5	6	7	8	9			
						Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan								330.000.000	
4	01	03	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	% Program Pembangunan Yang Difasilitasi	Setda	60%	70.000.000	APBD II	70%			77.000.000	
	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	% Pelaksanaan Monev Program Pembangunan	Setda	45%	150.000.000	APBD II	50%			165.000.000	
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	% Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Setda	100%	80.000.000	APBD II	100%			88.000.000	
4	01	03	2,03		Pengadaan Barang dan Jasa	% Lelang Paket Pengadaan Barang dan Jasa secara Transparan	Setda	100%	925.000.000	APBD II	100%			1.017.500.000	
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	% pengadaan barang/jasa Yang memenuhi standar ketepatan waktu	Setda	100%	165.000.000	APBD II	100%			181.500.000	
	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pengadaan barang/jasa Secara Elektronik	Setda/Mun a Barat	100%	660.000.000	APBD II	100%			726.000.000	
4	01	03		03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	% Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Setda	100%	100.000.000	APBD II	100%			110.000.000	
	01	03	2,04		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	% Hasil Pemantauan Kebijakan Terkait Sumberdaya Alam yang menjadi sektor-sektor perekonomian dan Pembangunan	Setda	65%	180.000.000	APBD II	80%			198.000.000	
4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,	% Monev terhadap Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Setda	60%	50.000.000	APBD II	70%			55.000.000	

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Kebutuhan		Sumber Dana	Target	Kebutuhan				
								Capaian Kinerja	Dana/Pagu	Indikatif		Capaian Kinerja	Dana/Pagu	Indikatif			
1					2	3	4	5	6	7	8	9					
					Kelautan dan Perikanan												
	01	03	2,04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	% Monev terhadap Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Setda	70%	60.000.000	APBD II	80%			66.000.000			
4	01	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	% Monev terhadap Kebijakan Energi dan Air	Setda	60%	70.000.000	APBD II	80%			77.000.000			
4	01	04			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	% Fasilitas Administrasi Umum dan Administrasi Keuangan	Setda	90%	1.838.500.000	APBD II	98%			2.022.350.000			
4	01	04	2,01		<i>Pelaksanaan Administrasi Umum</i>	<i>% Pelaksanaan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan</i>	Setda	85%	710.000.000	APBD II	100%			781.000.000			
21																	
	01	04	2,01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	% Fasilitas Penata Usahaan Pimpinan dan Kepegawaian	Setda	70%	250.000.000	APBD II	90%			275.000.000			
4	01	04	2,01	02	Pengelolaan Perlengkapan	% Pengelolaan Perlengkapan Dengan baik	Setda	80%	60.000.000	APBD II	100%			66.000.000			
4	01	04	2,01	03	Pengelolaan Rumah Tangga	% Pengelolaan Rumah Tangga Dengan baik	Setda	100%	400.000.000	APBD II	100%			440.000.000			
4	01	04	2,02		<i>Penataan Organisasi</i>	<i>% Pelaksanaan Penataan Organisasi dan</i>	Setda	90%	270.000.000	APBD II	98%						

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Capaian Kinerja			Capaian Kinerja				
1					2	3	4	5	6	7	8	9			
						Tatalaksana								297.000.000	
4	01	04	2,02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	% Data Tatalaksana OPD	Setda	60%	60.000.000	APBD II	70%			66.000.000	
4	01	04	2,02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	% Fasilitasi Penerapan SPM dan pelayanan Publik lainnya	Setda	90%	100.000.000	APBD II	100%			110.000.000	
4	01	04	2,02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	% Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang di administrasikan	Setda	100%	110.000.000	APBD II	100%			121.000.000	
4	01	04	2,03		Protokol dan Komunikasi Pimpinan	% Fasilitasi Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	Setda	90%	690.000.000	APBD II	100%			759.000.000	
4	01	04	2,03	01	Fasilitasi Keprotokolan	% Fasilitasi Keprotokolan	Setda	100%	280.000.000	APBD II	100%			308.000.000	
4	01	04	2,03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	% Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Setda	100%	350.000.000	APBD II	100%			385.000.000	
4	01	04	2,03	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Tugas Pimpinan yang Terdokumentasi	Setda	90	60.000.000	APBD II	90%			66.000.000	
4	01	04	2,04		Perencanaan dan Keuangan	% Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Setda	80%	168.500.000	APBD II	95%			185.350.000	
4	01	04	2,04	01	Pengelolaan Perencanaan	% Pengelolaan Perencanaan yang Tepat Waktu	Setda	80%	50.000.000	APBD II	100%			55.000.000	
4	01	04	2,04	02	Pengelolaan Keuangan	% Penganggaran yang Sesuai Kebutuhan	Setda	90%	59.000.000	APBD II	100%				

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Capaian Kinerja			Capaian Kinerja				
1					2	3	4	5	6	7	8	9			
													64.900.000		
4	01	04	2,04	03	Penatausahaan Pelaporan	% Terlaksananya Penatausahaan Pelaporan yang Rapi dan terukur	Setda	85%	59.500.000	APBD II	80%		65.450.000		
Jumlah Pagu Anggaran Sesuai Rancangan Awal RPJMD									23.891.000.000				26.280.100.000		

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat adalah **Program Tahunan** Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat. disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022, dengan Rancangan Awal Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Muna Barat, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Muna Barat.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Muna Barat,

Drs. L.M. HUSEIN TALI, M.Pd
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19650913 199101 1 003